

**RETRIBUSI PASAR MENURUT HUKUM ISLAM DAN HUKUM
POSITIF**

**(Studi Dinas Perindustrian dan Perdagangan UPT Pengelolaan Pasar
Kec. Baradatu Way Kanan)**

Skripsi

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-syarat
Guna Mendapatkan Gelar Sarjana S1 dalam Ilmu Syari'ah**

Oleh:

VISCA AYUNI

NPM. 1521020178

Jurusan : Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah)



**FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1441 H/2020 M**

**RETRIBUSI PASAR MENURUT HUKUM ISLAM DAN HUKUM
POSITIF**

**(Studi Dinas Perindustrian dan Perdagangan UPT Pengelolaan Pasar
Kec. Baradatu Way Kanan)**

Skripsi

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-syarat
Guna Mendapatkan Gelar Sarjana S1 dalam Ilmu Syari'ah**

Oleh:

**VISCA AYUNI
NPM. 1521020178**

Jurusan : Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah)

Pembimbing I: Dr. H. Bunyana Solihin, M.Ag

Pembimbing II : Dr. Hj. Linda Firdawaty, S.Ag., M.H.

**FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1441 H/2020 M**

ABSTRAK

Retribusi pasar merupakan salah satu dari retribusi daerah yang menjadi sumber penerimaan pendapatan daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan. Retribusi pelayanan pasar adalah pembayaran atas pemakaian Fasilitas milik daerah yang terdapat di pasar. Permasalahan dalam penelitian ini adalah Bagaimana pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 08 Tahun 2011 tentang retribusi pasar di Pasar Inpres Tiuh Balak Kecamatan Baradatu dan Bagaimana pandangan Hukum Islam dan Hukum Positif terhadap pelaksanaan retribusi pasar di Pasar Inpres Tiuh Balak Kecamatan Baradatu. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan retribusi pelayanan pasar di pasar Inpres Tiuh Balak, dan pandangan Hukum Islam terhadap Pelaksanaan Retribusi Pelayanan Pasar di Pasar Inpres Tiuh Balak. Kegunaan penelitian ini adalah agar pelaksanaan retribusi pelayanan pasar di Kabupaten Way Kanan dapat berjalan sesuai dengan peraturan daerah atau aturan yang telah berlaku. Penelitian ini termasuk penelitian lapangan (*Field Research*), yaitu mengadakan penelitian lapangan dengan cara observasi, wawancara dan dokumentasi. Penelitian ini bersifat Deskriptif analisis, sumber data yang digunakan data primer dan data sekunder. Pengolahan data menggunakan populasi dan sampel, analisis data menggunakan analisis kualitatif dan Komparatif. Hasil penelitian ini ditemukan bahwa Pelaksanaan pemungutan retribusi pelayanan pasar diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan No.08 Tahun 2011 tentang retribusi pasar yaitu pemungutan dilakukan satu kali dalam kurun waktu 24 jam dengan besaran pembayaran disesuaikan dengan ukuran tempat yang digunakan. Tetapi dalam praktiknya Jumlah pemungutan ditetapkan dengan mekanisme yang berbeda dan tidak sesuai dengan ketentuan Pemerintah yang tertuang dalam Peraturan Daerah No.08 Tahun 2011. Dalam pandangan Hukum Positif peraturan daerah yang dibuat oleh pemerintah sudah sesuai dengan kemampuan masyarakat dan tidak memberatkan pedagang. Namun pada praktiknya pelaksanaan retribusi pasar dilaksanakan tidak sesuai dengan peraturan daerah Way Kanan Nomor 08 Tahun 2011 tentang retribusi jasa umum. Retribusi pasar yang dilaksanakan di pasar Inpres dalam pandangan hukum Islam tidak memenuhi rukun dan syarat Ijarah. Sebagai pelaksana amanat petugas retribusi mempunyai tugas dan wewenang menegakkan kepastian hukum dan keadilan dalam menarik retribusi dengan menaati peraturan yang telah dibuat oleh pemerintah sebagaimana tertera dalam alquran surat an-nisa ayat 59.



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERIRADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Letkol. Hendro Suratmin Sukarame Bandar Lampung 35131 Tlp (0721)703260

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama	: Visca Ayuni
NPM	: 1521020178
Jurusan/Prodi	: Siyasah Syar'iyah
Fakultas	: Syariah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul "RETRIBUSI PASAR MENURUT HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF (Studi Dinas Perindustrian dan Perdagangan UPT Pengelolaan Pasar Kec. Baradatu Way Kanan)" adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam *footnote* atau daftar pustaka. Apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung, 03 Januari 2020
Penulis,



Visca Ayuni
1521020178



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
FAKULTAS SYARI'AH**

Jl. Letkol. Hendra Suraimin Sukarame, Bandar Lampung 35131 Tlp (0721) 703260

PERSETUJUAN

**Judul : RETRIBUSI PASAR MENURUT HUKUM
ISLAM DAN HUKUM POSITIF (Studi Dinas
Perindustrian dan Perdagangan UPT Pengelolaan
Pasar Kec. Baradatu Way Kanan)**
Nama : Visca Ayuni
Npm : 1521020178
Jurusan : Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah)
Fakultas : Syari'ah

MENYETUJUI

Untuk dimunaqosyahkan dan dipertahankan dalam sidang
munaqosyah Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. H. Bunyana Solihin, M.Ag.

Dr. Hj. Linda Firdawaty, S.Ag., M.H.

NIP. 1957070519809031001

NIP. 197112041997032001

**Mengetahui,
Ketua Jurusan**

Frenki, M.Si.

NIP. 198003152009011017



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
FAKULTAS SYARI'AH**

Jl. Letkol. Hendro Suratmin Sukarame Bandar Lampung 35131 Tlp (0721) 703260

PENGESAHAN

**Skripsi dengan judul : RETRIBUSI PASAR MENURUT
HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF (Studi Dinas
Perindustrian dan Perdagangan UPT Pengelolaan Pasar Kec.
Baradatu Way Kanan), disusun oleh: VISCA AYUNI, NPM:
1521020178, Jurusan: Hukum Tata Negara (Siyasah
Syar'iyah), telah di ujikan dalam sidang Munaqosyah di
Fakultas Syar'iah pada Hari/Tanggal : Rabu, 22 Januari 2020.**

TIM DEWAN PENGUJI

Ketua : Drs. Susiadi AS., M. Sos.I.

Sekretaris : Erik R. Gumiri, M.H.

Penguji Utama : Dr. H. Jayusman, M.Ag.

Penguji Pendamping 1: Dr. H. Bunyana Solihin, M.Ag.

Penguji Pendamping 2 : Dr. Hj. Linda Firdawaty, S.Ag., M.H

**Mengetahui
Dekan Fakultas Syari'ah**

Boekas M. H.

NIP. 196210211993031002

MOTTO

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ ط فَإِنْ تَنَزَعْتُمْ
فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ؕ ذَلِكَ خَيْرٌ
وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿٥٩﴾

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.¹

¹ Al-Quran Surah An-Nisa Ayat 59

PERSEMBAHAN

Skripsi ini dipersembahkan kepada yang sering bertanya kapan aku wisuda :

1. Kedua orang tuaku tercinta Bapak Endang Antony dan Ibu Ermi Daryanti, dengan jiwa besar yang sabar membesarkanku, mendoakanku, mendidikku, dan selalu mendukungku sejak dari kandungan hingga dewasa seperti ini. Berkat doa keduanyalah sehingga dapat menyelesaikan kuliah ini.
2. Adikku tyara meilinda yang selalu aku sayangi semoga dengan gelar yang aku dapat sekarang dengan usaha yang telah aku lakukan kelak dapat menjadi motivasi bagimu supaya bisa terus melanjutkan pendidikan dan mengejar cita-cita serta ajoku kakak yang kusayangi semoga kelak berubah dan tidak berkecil hati serta dapat terus semangat kedepannya dan kembali mengejar hal-hal yang sudah tertinggal.
3. Pembimbing I Dr. H. Bunyana Solihin, M.Ag., dan pembimbing II Dr. Hj. Linda Firdawaty, S.Ag.,M.H. yang telah banyak berkontribusi membimbing dan memberi pengarahan dengan penuh kesabaran dalam penyusunan skripsi ini
4. kepada Roynaldi yang selalu mendukung dalam suka dan duka serta sahabatku Ismi Rahayu, Yosi Mareta, Sheila P dan Ayuni Antenar, Acan, Mega, Listin dan Nova yang selalu bertanya kapan ku munaqasah.
5. Jurusan Siyasah khususnya Siyasah B kalian lah yang membuat perkuliahanku menjadi berwarna.
6. Almamater tercinta Fakultas Syariah Universitas Negeri Raden Intan Lampung.

RIWAYAT HIDUP

Nama lengkap penulis adalah Visca Ayuni, penulis dilahirkan di Way Kanan, pada tanggal 12 Januari 1997. Penulis merupakan anak kedua dari tiga bersaudara dari pasangan Bapak Endang Antony dan Ibu Ermi Daryanti.

Penulis menyelesaikan pendidikan sekolah dasar SDN 01 Setia negara pada tahun 2009, kemudian melanjutkan studi SMPN 01 Baradatu yang diselesaikan pada Tahun 2012, dan melanjutkan SMA negeri 1 Baradatu yang diselesaikan pada tahun 2015.

Penulis melanjutkan study akademik pada tahun 2015 dengan terdaftar sebagai mahasiswa S1 Hukum Tata Negara di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

Bandar Lampung, 12 Desember 2019

Yang Membuat,

Visca Ayuni

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Alhamdulillah segala puji bagi Allah SWT, Yang Maha Kuasa telah memberikan nikmat, taufiq dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, yang disusun sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum pada jurusan Siyasah di Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung, shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, Para Sahabat, Keluarga dan Pengikutnya.

Dalam penyelesaian skripsi ini, penulis telah menerima banyak bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak serta dengan tidak mengurangi rasa hormat dan terimakasih atas bantuan berbagai pihak, maka secara khusus penulis ingin menyebutkan beberapa sebagai berikut:

1. Dr. H.Khairuddin, M.H. selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung.
2. Frenki, M.Si. selaku Ketua jurusan siyasah UIN Raden Intan Lampung
3. Dr. H. Bunyana Solihin, M.Ag., selaku pembimbing I dan pembimbing II Dr. Hj. Linda Firdawaty, S.Ag.,M.H. Selaku pembimbing II, yang telah menyediakan waktu dan memberikan bimbingan dengan ikhlas dan sabar yang sangat berharga dalam mengarahkan dan memotivasi penulis sehingga terselesaikan skripsi ini.
4. Seluruh dosen Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung yang telah mendidik dan mengajarkan ilmu pengetahuan yang bermanfaat hingga penulis dapat menyelesaikan skripis ini.

5. Seluruh staf dan karyawan tata usaha Fakultas Syariah, Perpustakaan fakultas Syariah dan perpustakaan UIN Raden Intan Lampung yang telah memberikan fasilitas dan bantuannya dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Way Kanan dan UPT Pengelolaan Pasar Kec. Baradatu yang telah memberikan bantuan dan kesempatan kepada penulis untuk mengadakan penelitian dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Semua pihak yang telah memberikan bantuan baik moril maupun materil sehingga terselesaikan skripsi ini.

Semoga Allah membalas jasa dan budi kita semua dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat. Penulis sadar bahwa skripsi ini banyak kekurangan dan jauh dari kata sempurna, mengingat kemampuan yang terbatas. Untuk ini kepada para pembaca kiranya dapat memberikan masukan dan saran-sarannya serta kritikan sehingga penelitian ini akan lebih baik.

Peneliti berharap skripsi ini bermanfaat bagi penulis dan khususnya bagi pembaca pada umumnya.

Bandar Lampung, 12 Desember 2019

Visca Ayuni

DAFTAR ISI

JUDUL	i
ABSTRAK	ii
PERNYATAAN	iii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iv
PENGESAHAN	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN	vii
RIWAYAT HIDUP	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	xiii

BAB I PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul	1
B. Alasan Memilih Judul	2
C. Latar Belakang Masalah	3
D. Fokus Penelitian	9
E. Rumusan Masalah	9
F. Tujuan Penelitian	10
G. Signifikasi Penelitian	10
H. Metode Penelitian	11

BAB II KAJIAN TEORI

A. Retribusi Pasar Menurut Hukum Islam	
1. Pajak dalam Perspektif Hukum Islam	25
2. Retribusi dan Pajak Dalam Hukum Islam	27
3. Ijarah	34
B. Retribusi Pasar Menurut Hukum Positif	
1. Pengertian Retribusi	36
2. Retribusi Daerah	37
3. Objek Retribusi	42
4. Retribusi Pelayanan Pasar	44
C. Tinjauan Pustaka	

BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	
1. Sejarah Berdirinya Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Way Kanan	50
2. Visi dan misi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Way Kanan	54
3. Struktur Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Way Kanan	55
B. Gambaran pasar inpres Tiuh Balak Kecamatan Baradatu	58
C. Peran Dinas Perindustrian dan Perdagangan UPT Pengelolaan	

Pasar dalam Pelaksanaan Retribusi Pasar	67
D. Pelaksanaan Retribusi Pasar di Pasar Inpres Tiuh Balak Kec. Baradatu	70

BAB IV ANALISIS PENELITIAN

A. Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan No. 08 Tahun 2011 tentang Retribusi Pasar di Pasar Inpres Tiuh Balak.....	74
B. Pandangan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Retribusi Pasar Berdasarkan Peraturan daerah No. 08 Tahun 2011	79

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	83
B. Rekomendasi	84

DAFTAR PUSTAKA

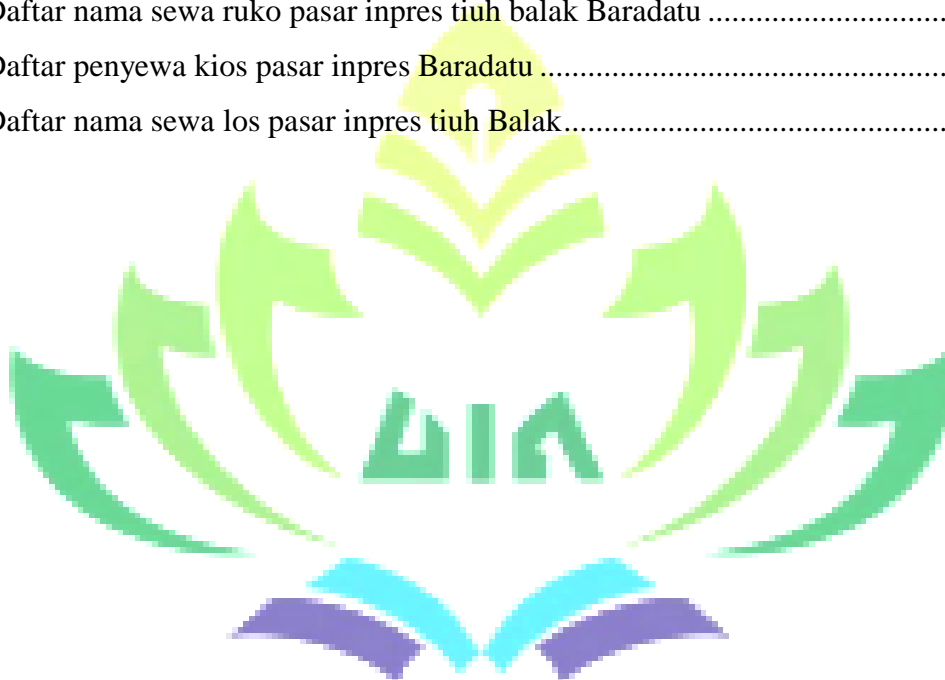
LAMPIRAN-LAMPIRAN



DAFTAR TABEL

Tabel

1. Ketetapan jizyah pada masa Khalifah Umar	32
2. Struktur dan besarnya tarif retribusi	47
3. Jumlah pasar di Kabupaten Way Kanan.....	58
4. Data pasar Pemda Kabupaten Way Kanan.....	59
5. Daftar nama sewa ruko pasar inpres tiuh balak Baradatu	62
6. Daftar penyewa kios pasar inpres Baradatu	63
7. Daftar nama sewa los pasar inpres tiuh Balak.....	63



BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Sebelum menjelaskan secara keseluruhan materi ini terlebih dahulu akan diberikan penegasan dan pengertian yang terkandung didalamnya agar tidak terjadi kesalahan dan kerancuan perspektif dalam memahami judul skripsi ini. Skripsi ini berjudul **“Retribusi Pasar Menurut Hukum Islam Dan Hukum Positif (Studi Dinas Perindustrian dan Perdagangan UPT Pengelolaan Pasar Kec.Baradatu Way Kanan)”** Untuk menghindari kekeliruan dan kesalahpahaman dalam memahami pengertian judul yang dimaksud maka perlu dijelaskan makna judul tersebut.

1. Retribusi Pasar adalah pungutan uang oleh pemerintah dan sebagainya, sebagai balas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan pribadi atau badan.² Menurut Peraturan Daerah Way Kanan Nomor 08 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Umum disebutkan bahwa Retribusi Pelayanan Pasar merupakan pungutan retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan penyediaan fasilitas pasar tradisional sederhana berupa pelataran, los, kios yang dikelola oleh pemerintah daerah dan disediakan khusus untuk pedagang.³

²Ahmad Jalaluddin, *Pengantar Hukum Pajak* (Bandar Lampung: Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung, 2019), h.6.

³Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum Pasal 24

2. Hukum Islam merupakan seperangkat peraturan dan ketentuan yang berkenaan dengan kehidupan berdasarkan Alquran dan Hadis, hukum yang bersumber dari dan menjadi bagian agama Islam.⁴ Untuk ditaati dalam kehidupan baik itu berhubungan dengan hak dan kewajiban berdasarkan prinsip-prinsip keadilan.
3. Hukum Positif adalah hukum yang ditetapkan oleh penguasa yang berwenang atau berdaulat, yang di terapkan dalam masyarakat pada tempat dan waktu tertentu yang dilengkapi dengan sanksi yang dapat dipaksakan oleh penguasa bila hukum positif itu di langgar.⁵

Berdasarkan beberapa pengertian diatas maka dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa maksud judul skripsi ini adalah "Retribusi Pasar Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif (Studi Dinas Perindustrian dan Perdagangan UPT Pengelolaan Pasar Kec.Baradatu Way Kanan)" Adalah penelitian pelaksanaan retribusi pasar di pandang dari segi hukum Islam dan hukum positif.

B. Alasan Memilih Judul

Adapun alasan yang mendorong penulis dalam memilih judul "Retribusi Pasar Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif Perda No. 08 Tahun 2011(Studi Dinas Perindustrian dan Perdagangan UPT Pengelolaan Pasar Kec.Baradatu Way Kanan) adalah sebagai berikut:

⁴Mohammad Daud Ali,*Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007),h.42.

⁵A'an Efendi, Freddy Poernomo,IG.NG Indra S.Ranuh, *Teori Hukum* (Jakarta:Sinar Grafika, 2017),h.65.

1. Alasan Objektif

Retribusi pasar adalah pungutan retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan penyediaan fasilitas pasar tradisional/ sederhana berupa pelataran, los, kios, yang dikelola oleh pemerintah daerah dan disediakan khusus untuk pedagang yang berguna untuk menunjang kegiatan jual beli dalam suatu daerah yang disediakan atau difasilitasi oleh Pemerintah setempat. Retribusi pasar yang dilaksanakan di pasar Inpres Tiuh Balak tidak dilaksanakan sesuai dengan Peraturan yang berlaku sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Daerah Way Kanan Nomor 08 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum. Dalam hal ini penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam, tentang Retribusi Pasar Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan UPT pengelola Pasar Kec. Baradatu Way Kanan.

2. Alasan Subjektif

- a. Permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini adalah termasuk salah satu bidang studi ilmu penulis tekuni di Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung.
- b. Literatur cukup tersedia dan mendukung sehingga diharapkan dalam penulisan dapat diselesaikan.

C. Latar Belakang Masalah

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia, pemerintah membagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi terdiri atas daerah-daerah kabupaten dan kota. Tiap-tiap daerah

tersebut mempunyai hak dan kewajiban untuk mengatur serta mengurus sendiri urusan pemerintahannya, guna meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan kepada masyarakat. Dalam rangka untuk meningkatkan pembangunan daerah, maka pemerintah melakukan kebijakan yaitu, setiap daerah diberi wewenang untuk mencari sumber-sumber penerimaan lain selain bantuan dari pemerintah pusat, misalnya pajak-pajak daerah sesuai dengan retribusi yang dimiliki oleh masing-masing daerah.

Untuk menyelenggarakan pemerintahan tersebut, maka daerah berhak mengenakan pungutan kepada masyarakat. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945, yang menetapkan perpajakan sebagai salah satu perwujudan kenegaraan, ditegaskan bahwa penempatan beban kepada rakyat, seperti pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa yang diatur dalam Undang-Undang. Dengan demikian, pungutan pajak daerah dan retribusi daerah harus didasarkan pada Undang-Undang yaitu Undang-undang nomor 28 tahun 2009,⁶ bahwa Pajak dan Retribusi Daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintah daerah dalam melaksanakan tugas pemerintah dan pembangunan senantiasa memerlukan sumber penerimaan yang dapat diandalkan.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, jenis retribusi jasa umum adalah:

- a. Retribusi Pelayanan Kesehatan;
- b. Retribusi Pelayanan Persampahan/kebersihan;

⁶Undang-undang Pajak Lengkap Tahun 2011(Jakarta:Mitra Wacana Media,2011),h.382

- c. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil;
- d. Retribusi pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat;
- e. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum;
- f. Retribusi Pelayanan Pasar;
- g. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor;
- h. Retribusi Pemeriksaan Alat pemadam Kebakaran;
- i. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta;
- j. Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus;
- k. Retribusi Pengolahan Limbah Cair;
- l. Retribusi Pelayanan Tera/tera Ulang;
- m. Retribusi Pelayanan Pendidikan; dan
- n. Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi.⁷

Retribusi sebagai salah satu sumber penerimaan daerah tidak dapat diabaikan perannya dalam usaha peningkatan pendapatan daerah. Penerimaan retribusi merupakan sumber pendapatan yang paling penting dalam mengisi kas negara guna membiayai kegiatan pemerintah daerah dalam rangka pembangunan daerah. Sebagaimana Retribusi Pelayanan Pasar masuk kedalam retribusi daerah pajak kabupaten/kota dalam peraturan perundang-undangan nomor 28 tahun 2009 untuk dapat dipungut pada suatu daerah kabupaten atau kota maka pemerintah daerah harus terlebih dahulu menerbitkan Peraturan Daerah tentang retribusi pasar yang akan menjadi

⁷*Ibid.*

landasan hukum dalam teknis pelaksanaan pengenaan dan pemungutan retribusi pelayanan pasar di daerah kabupaten/kota. Peraturan daerah mengenai retribusi pelayanan pasar diatur dalam perda no 8 tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum Kabupaten Way Kanan.

Retribusi pasar adalah pelayanan atau jasa yang menyediakan fasilitas pasar baik itu tradisional/ sederhana yang berguna untuk menunjang kegiatan jual beli dalam suatu daerah tertentu. Di dalam pelaksanaan retribusi pasar, yang berwenang adalah Dinas Pasar melalui unit pasar yang berada di pasar-pasar yang berada di pasar-pasar tertentu, bahwa adanya pemberian jasa berupa pengaturan dan penertiban tempat berdagang bagi para pedagang sesuai dengan lokasi yang tersedia dan jenis-jenis dagangan yang dijual baik di kios, los, pelataran dengan tujuan tertib dan teratnya pasar. Para pedagang diwajibkan untuk membayar uang retribusi dan harus mematuhi sesuai dengan tarif yang telah ditentukan sesuai dengan peraturan daerah yang berlaku.

Pada pelaksanaan pungutan retribusi yang terjadi di pasar Inpres Tiuh Balak terdapat ketidaksesuaian antara jumlah dan jenis pemungutan retribusi dengan ketentuan yang berlaku yang tertuang dalam Peraturan Daerah Way Kanan Nomor 08 Tahun 2011 tentang retribusi jasa umum. dalam peraturan tersebut seharusnya pemungutan retribusi dilaksanakan satu kali perharinya akan tetapi justru dipungut sampai dengan enam kali.⁸

⁸Fina, Wawancara pedagang pasar Inpres Tiuh Balak, 01 Oktober 2019.

Dalam pelaksanaan perjanjian pungutan retribusi pihak pertama adalah orang yang membayar retribusi dan orang yang menerima retribusi disebut sebagai pihak kedua. Dalam prosesnya pihak pengelola pasar memberikan karcis sebagai bukti adanya perjanjian dengan penyewa atau pedagang atas pungutan retribusi pelayanan pasar.⁹

Namun berdasarkan hasil pengamatan peneliti pada objek penelitiannya yaitu pasar Inpres Tiuh Balak Kecamatan Baradatu mengalami penyimpangan retribusi pelayanan pasar yang seharusnya dilakukan sekali perhari justru dilakukan melebihi ketentuan peraturan yang berlaku. Tentu melanggar aturan tentang retribusi pelayanan pasar pada Peraturan Daerah Way Kanan Nomor 08 Tahun 2011 tentang retribusi jasa umum.¹⁰

Pada awal Pemerintahan Islam waktu itu pendapatan pemerintah hanya berasal dari sumbangan publik. Zakat pada saat itu belum diwajibkan pada awalnya. Namun seiring perkembangan Islam, Nabi mulai membuat beberapa kebijakan termasuk membangun masjid selain tempat untuk ibadah juga merupakan pusat pemerintahan. Baitul mal pada masa awal pemerintahan merupakan sebuah lembaga keuangan negara yang mengatur pemasukan dan pengeluaran pemerintah bagi rakyatnya agar pemerintahan dapat terus berjalan¹¹. Pada masa Rasulullah Islam mengatur juga masalah pajak yang lebih dikenal dengan zakat. Zakat diperuntukkan bagi umat muslim yang

⁹Suwardi, *Wawancara* Kepala Kasubbag UPT Pengelolaan Pasar Wilayah II Kec. Baradatu Way Kanan, 01 Oktober 2019.

¹⁰Peraturan Daerah Way Kanan Nomor 08 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum.

¹¹Nurul Huda, *dkk, keuangan publik islami pendekatan teoritis dan sejarah Publik Islami* (Jakarta: Prenada Media Group, 2012), h.272.

diatur dalam baitul mal dan jizyah atau pajak dibebankan kepada umat non muslim yang dibayar kepada pemerintah islam.

Dalam Islam telah diatur bahwa kita bukan hanya harus mematuhi aturan-aturan hukum yang telah Allah dan Rasul tetapkan. Tetapi, kita juga harus mematuhi aturan Pemerintah atau pemimpin yang biasa disebut dengan Ulil Amri. apabila menyalahi aturan yang telah ditentukan dari suatu pemimpin maka hal tersebut jelas telah melalaikan yang telah Allah tetapkan. Hal ini sesuai dengan surat An-Nisa ayat 59:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِيَ الْأَمْرِ مِنْكُمْ ۖ فَإِنْ تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ
ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿٥٩﴾

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.(QS. Surat An-nisa:59)

Segala sesuatu harus berdasarkan peraturan yang telah ditentukan dan atas dasar suka sama suka dalam menjalankan suatu perjanjian baiknya dilakukan dengan kejujuran dan atas kerelaan bagi kedua belah pihak. Hal ini sesuai dengan surat An-Nisa ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ
تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan

yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.(QS.Surah An-Nisa:29)

Dari uraian di atas maka penulis tertarik untuk melakukan kajian ilmiah melalui penelitian dan selanjutnya dituangkan dalam bentuk skripsi, untuk itu maka penulis memilih judul : “Retribusi Pasar Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif (Studi Dinas Perindustrian dan Perdagangan UPT Pengelolaan Pasar Kec. Baradatu Way Kanan)”.

D. Fokus Penelitian

Fokus penelitian didalam skripsi ini terdapat pada pelaksanaan Retribusi Pelayanan Pasar berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2011 (Retribusi Jasa Umum) di Kabupaten Way Kanan, serta menurut hukum Islam terhadap pelaksanaan Retribusi Pelayanan Pasar Nomor 08 Tahun 2011 di Kabupaten Way Kanan.

E. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah penelitian ini adalah :

1. Bagaimana Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 08 Tahun 2011 tentang Retribusi Pasar di Pasar Inpres Tiuh Balak Kecamatan Baradatu ?
2. Bagaimana Pandangan Hukum Islam dan Hukum Positif terhadap Pelaksanaan Retribusi Pasar di Pasar Inpres Tiuh Balak Kecamatan Baradatu ?

F. Tujuan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan di atas, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini yaitu:

- a. Mendeskripsikan tentang pelaksanaan retribusi pelayanan pasar sesuai dengan Peraturan Daerah No. 08 tahun 2011 di Kecamatan Baradatu Way Kanan.
- b. Untuk menganalisis pelaksanaan retribusi pelayanan pasar menurut Perda Nomor 08 Tahun 2011 ditinjau dari Hukum Islam.

G. Signifikasi Penelitian

Sangat penting penelitian Retribusi ini dilakukan agar pelaksanaan Retribusi Pelayanan Pasar di kabupaten Way Kanan dapat berjalan sesuai peraturan Daerah atau aturan yang telah berlaku dan mampu memberikan analisis Hukum Islam terhadap Retribusi Pelayanan Pasar di Kabupaten Way Kanan. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan agar kelak dapat memberikan kontribusi pada akademis khususnya hukum yang berkaitan dengan analisis hukum menggunakan analisis hukum Islam yang lebih mendalam terhadap retribusi pelayanan pasar di Kecamatan Baradatu Way Kanan dan diharapkan dapat menjadi sumbangan pemikiran bagi kemajuan ilmu hukum pada umumnya dan hukum tata negara UIN Raden Intan Lampung. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan dalam menggali nilai hukum dalam kehidupan sosial.

H. Metode Penelitian

Metode penelitian artinya ilmu tentang cara melakukan penelitian dengan teratur (sistematis)¹². Metode Penelitian adalah suatu cara atau jalan yang digunakan dalam mencari, menggali, mengolah dan membahas data dalam suatu penelitian untuk memperoleh pemecahan terhadap masalah¹³. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode-metode sebagai berikut:

1. Jenis dan Sifat Penelitian

a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*). Penelitian lapangan yaitu penelitian dengan karakteristik masalah yang berkaitan dengan latar belakang dan kondisi saat ini dari subjek yang diteliti serta interaksinya dengan lingkungan.¹⁴ Penelitian ini dilakukan dengan menggali data yang bersumber dari lapangan yaitu berupa wawancara (*interview*) untuk mendapatkan informasi terhadap UPT pengelola Pasar Inpres Tiuh Balak Kecamatan Baradatu Way Kanan.

b. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat Deskriptif-Analitis. Deskriptif-Analitis adalah suatu metode dalam meneliti suatu objek yang bertujuan membuat

¹²Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bhakti, 2004), h. 57.

¹³Joko Subagyo, *Metode Penelitian dalam teori dan Praktek* (Jakarta: PT. Rineka cipta, 1994), h. 2.

¹⁴Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Riset Sosial* (Bandung: Alumni, 1986), h. 33.

deskripsi, gambaran, atau lukisan secara sistematis dan objektif mengenai fakta-fakta, sifat-sifat, ciri-ciri serta hubungan diantara unsur-unsur yang ada didalam fenomena tertentu¹⁵ dengan pendekatan kualitatif dan data yang diperoleh langsung dari penelitian yang berkaitan dengan retribusi pelayanan pasar Peraturan Daerah Nomor 8 tahun 2011.

2. Data dan Sumber Data

Untuk membahas permasalahan-permasalahan yang diungkapkan dalam penelitian ini, diperlukan adanya data yang tersedia dari:

a. Data Primer

Data primer adalah sumber data yang dikumpulkan secara langsung dari objek penelitian yaitu peneliti terjun langsung kelapangan guna melakukan observasi, wawancara serta dokumentasi¹⁶. Dalam hal ini data primer diperoleh dari Dinas Pasar dengan melakukan interview di UPT Pengelolaan Pasar kecamatan Baradatu Way Kanan. Adapun bahan hukum primer dalam penelitian ini adalah Al-Quran serta perundang-undangan yang berkaitan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 08 Tahun 2011.

b. Data sekunder

Data sekunder adalah data yang bahannya didapat dari penelitian kepustakaan dengan mengkaji peraturan perundang-undangan

¹⁵Koentjaraningrat, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat* (Jakarta: Gramedia, 1985), h. 29.

¹⁶Kartini Kartono, *Pengantar Metode...*, h. 28.

atau literature buku-buku, jurnal, skripsi, dan media yang terkait dengan masalah penelitian¹⁷.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan komponen yang mempengaruhi kualitas data hasil penelitian. Kualitas pengumpulan data berkenaan dengan ketepatan cara-cara yang digunakan untuk mengumpulkan data¹⁸. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Metode Observasi

Observasi adalah pengamatan yang dilakukan secara sengaja, sistematis mengenai fenomena sosial dengan gejala-gejala psikis untuk kemudian dilanjutkan.¹⁹ Jadi observasi yaitu pengumpulan data dengan cara cermat dan sistematis. Dengan demikian Observasi yang dilakukan akan diteliti dan dapat melihat secara langsung kondisi lapangan. Serta mencatat kegiatan atau situasi objek yang diteliti di kantor UPT Pengelolaan Pasar Kecamatan Baradatu.

b. Wawancara

Wawancara adalah kegiatan pengumpulan data primer yang bersumber langsung dari responden penelitian di lapangan (lokasi)²⁰ dengan cara Tanya jawab secara lisan maupun tulisan dan

¹⁷ Amirudin dan Zainal Abidin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), h.30.

¹⁸ Sugiono, *Metode Penelitian Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2010), h.137.

¹⁹ Joko Subagyo, *Metode Penelitian dalam Teori & Praktik* (Jakarta : Rineka Cipta, 2011), h. 62.

²⁰ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum* (Bandung : PT.Citra Aditya Bakti, 2004), h. 86.

bertatap muka secara langsung melalui pesawat telepon dengan narasumber dan jawaban-jawaban responden dicatat atau direkam.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah merupakan pengumpulan data dengan jalan melihat, membaca, mempelajari, kemudian mencatat data yang sudah ada hubungannya dengan objek penelitian²¹. Dokumentasi merupakan salah satu memperoleh data dengan cara pencatatan hasil wawancara, foto-foto yang diperlukan dalam penelitian, hasil rekaman oleh narasumber.

4. Metode Pengolahan Data

Pengolahan data adalah suatu proses dalam memperoleh data ringkasan dengan menggunakan cara-cara atau rumusan tertentu. Data yang telah dikumpulkan kemudian diolah, pengolahan data pada umumnya dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- a. Editing, yaitu pengecekan atau pengoreksian data yang telah dikumpulkan, karena kemungkinan data yang masuk atau terkumpul itu tidak logis dan meragukan.²² Mengoreksi apakah data yang terkumpul sudah cukup lengkap, sudah benar, dan sudah sesuai/relevan dengan masalah.²³

²¹Sri Murniati dan Dwi Kasasih, "Analisis Kontribusi dan Efektivitas Penerimaan Retribusi Pelayanan Pasar terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Palembang", *jurnal Kompetitif*, Vol.6 N0.1, Januari- Juli 2017, diakses pada 1 Desember 2019 , h.95

²²Susiadi, *Metode Penelitian*, Bandar Lampung (Bandar Lampung: Pusat Penelitian dan Penertiban LP2M IAIN Raden Intan Lampung 2015), h.115.

²³Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum* (Bandung : PT. Citra Aditya Bhakti, 2004), h. 126.

- b. Koding, yaitu mengklarifikasikan jawaban-jawaban dari para responden ke dalam kategori²⁴, atau memberikan catatan atau tanda yang menyatakan jenis sumber data atau urutan sumber masalah.
- c. Rekonstruksi data, yaitu menyusun ulang data secara teratur berurutan dan sistematis.²⁵
- d. Sistematis data, yaitu menempatkan data menurut kerangka sistematika bahan berdasarkan urutan masalah.²⁶

5. Populasi dan Sampel

1. Populasi (sasaran) penelitian

Populasi adalah jumlah keseluruhan atau totalitas objek yang diteliti²⁷. objek yang diteliti dapat berupa orang, lembaga, media dan sebagainya. Populasi digunakan sebagai penyebutan seluruh elemen atau anggota dari seluruh wilayah yang menjadi sasaran penelitian. Dalam skripsi ini populasinya adalah seluruh pegawai pelaksana Dinas Perindustrian dan Perdagangan dan penerima fasilitas Daerah atau para Pedagang Pasar.

Dari data yang didapat jumlah keseluruhan populasi pedagang pasar Inpres Tiuh Balak terdapat 98 orang pedagang yang mengisi ruko, kios serta los dan petugas pengelola pasar 13 orang. Jadi total keseluruhan populasi ada 111 orang.

²⁴*Ibid.*

²⁵*Ibid.*

²⁶*Ibid.*

²⁷Sutrisno Hadi, *Metode Research*, (Yogyakarta: Andi Offset, 1995), h. 207.

2. Sampel

Sampel adalah sebagian yang diambil dari keseluruhan objek yang diteliti yang dianggap mewakili terhadap populasi dan diambil menggunakan teknik tertentu.²⁸ Dalam penelitian ini, tidak semua populasi akan dijadikan sumber data, melainkan dari sampel saja. Pengambilan sampel menggunakan metode non random sampling yaitu tidak semua individu dalam populasi dapat diberi peluang yang sama menjadi sampel²⁹. Dikarenakan keterbatasan dana, tenaga serta waktu, yang pada umumnya populasi tersebut berjumlah besar dan peneliti tidak mungkin mempelajari semua populasi maka sampel harus benar-benar yang mewakili populasi.

Jadi sampel tidak diambil secara acak tetapi ditentukan sendiri oleh peneliti. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini antara lain: Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Way Kanan (1 orang), petugas UPT Pengelolaan pasar (2 orang), Pedagang pasar (8 orang). Maka sampel dalam penelitian ini berjumlah 11 orang.

6. Analisis data

Tujuan analisis data ini adalah untuk memperoleh perbandingan antara Hukum Islam dan Hukum Positif terhadap Pelaksanaan retribusi pasar yang ada di pasar Ipres Baradatu Kabupaten Way Kanan, dan selanjutnya memberikan solusi terhadap permasalahan-permasalahan yang timbul

²⁸Ali Muhammad, *Penelitian Kependidikan Prosedur dan Strategi*, (Bandung: Angkasa, 1987), h. 193.

²⁹Sutrisno Hadi, *Metode Research* (Yogyakarta: Yayasan Penerbit Fakultas Psikologi UGM, 1973), H. 80.

dalam praktek. Setelah keseluruhan data dikumpulkan, maka langkah selanjutnya adalah penulis menganalisis data tersebut agar dapat ditarik kesimpulan. Dalam menganalisis data penulis menggunakan metode berfikir deduktif yakni berangkat dari fakta-fakta yang umum, peristiwa-peristiwa yang kongkrit. Kemudian dari fakta-fakta dan peristiwa yang umum kongkrit itu ditarik kegeneralisasi-generalisasi yang mempunyai sifat khusus³⁰.

Metode analisis yang digunakan ialah dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dan Komparatif. Deskriptif adalah suatu penelitian untuk memberikan gambaran tentang suatu keadaan secara objektif. Kualitatif adalah suatu penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa ucapan atau perilaku orang-orang yang diamati.³¹ Penelitian ini menganalisa data yang diperoleh dari hasil observasi dan wawancara mengenai tarif retribusi pasar dengan membandingkan menurut Hukum Islam dan Hukum Positif sehingga dapat menjadi suatu kesimpulan umum yang sesuai dengan pengamatan peneliti di lapangan.

³⁰Sutrisno Hadi, *Metode Research Jilid I* (Yogyakarta: Andi, 2002), h.42.

³¹Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1986), h. 112.

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Retribusi Pasar Menurut Hukum Islam

Retribusi pasar merupakan salah satu dari bagian pendapatan asli daerah. Pendapatan asli daerah bersumber dari hasil pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah dan pendapatan lain asli daerah lainnya, yang mana bertujuan untuk membuat kemandirian dalam pelaksanaan otonomi daerah. Guna mengatur dan mengurus sendiri segala keperluan dan kepentingan masyarakat daerahnya masing-masing baik pendanaannya maupun sistem yang ada di daerah tersebut sebagai perwujudan asas desentralisasi sebagaimana telah ditetapkan oleh undang-undang. Untuk mengelola sumber penerimaan negara dan sumber pengeluaran negara Rasulullah menyerahkan kepada Baitul Mal. Baitul Mal sudah ada sejak masa Rasulullah Saw, yaitu pada saat kaum muslimin mendapatkan ghanimah pada perang Badar. Pada masa Rasulullah, Baitul Mal adalah sebagai pihak yang mengurus setiap harta benda kaum muslimin, baik itu berupa pendapatan maupun pengeluaran.³²

Pada masa-masa awal pemerintahan Islam di Madinah (623 M) atau Tahun 1 Hijriyah, pendapatan dan pengeluaran negara hampir tidak ada. Situasi mulai berubah, setelah turunnya surat Al-Anfal (rampasan perang). Pada perang Badar di tahun 2 hijriyah, sejak itu negara mulai mempunyai pendapatan dari hasil rampasan perang (ghanimah) yang disebut dengan

³²Gusfahmi, *Pajak dan Menurut Syariah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), h.59

khums (seperlima), berupa kuda, unta, dan barang-barang bergerak lainnya yang didapatkan pada saat peperangan.³³ Selain khums, akibat peperangan tersebut juga diperoleh pendapatan baru yaitu berupa uang tebusan dari tawanan yang ditawan pada saat peperangan. Kekayaan pertama yang merupakan sumber pendapatan resmi negara (penerimaan penuh yang dapat digunakan sepenuhnya untuk negara) adalah fay'i yaitu merupakan harta yang diperoleh dari suku Bani Nadhir, suku bangsa Yahudi yang tinggal di pinggiran kota Madinah, yang melanggar Piagam Madinah tidak melalui peperangan. Rasulullah juga mendapatkan penerimaan negara dari waaqaf, berupa tanah pemberian seorang Rabbi dari Bani Nadhir bernama Mukhairik yang telah masuk Islam.³⁴

Pemerintah menggunakan biaya-biaya untuk melakukan sebagai salah satu tanggung jawab terhadap masyarakat guna kesejahteraan masyarakat, terkait pembiayaan pada sektor publik oleh negara. Sumber-sumber pendapatan negara di zaman Rasulullah SAW meliputi Zakat, kharaj, khums, ghanimah, fai, dan jizyah.

Zakat adalah rukun Islam yang ketiga, zakat diwajibkan di Madinah pada tahun kedua Hijriah. Namun ada juga yang berpendapat bahwa perintah diwajibkan nya zakat bersamaan dengan turunnya perintah kewajiban salat pada saat Nabi berada di Mekah.³⁵ Dalam firman Allah Swt dalam QS Al-Baqarah (2) ayat 43 :

³³*Ibid*, h.53.

³⁴*Ibid*, h.54.

³⁵*Ibid*, h.91.

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ ﴿٤٣﴾

Artinya : “dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku’lah beserta orang-orang yang ruku”.(QS.Surah Al-Baqarah :43)

Pada masa awal-awal Islam, penerimaan pendapatan negara yang bersumber dari zakat berupa uang tunai, hasil pertanian dan hasil perternakan. Zakat merupakan unsur penting karena sistem penunaianya yang bersifat wajib. Pungutan zakat menjadi wajib dan diambil alih oleh pemerintah dengan menugaskan amil atau petugas pemungut.³⁶Perintah memungutnya terdapat dalam surat At-Taubah(9) ayat 103:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٠٣﴾

Artinya: “ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka, dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketentraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”.(QS.Surah At-Taubah: 103)

Sumber pendapatan yang pertama kali dikenalkan oleh Rasulullah SAW pada zaman itu adalah kharaj. Kharaj adalah pajak khusus atas tanah atau hasil tanah, dimana para pengelola wilayah taklukan harus membayar kepada negara islam. Kharaj pada era awal islam ketika khaybar ditaklukan, merupakan sebagai pajak tanah yang dipungut dari non-muslim yang kemudian tanahnya diambil alih oleh orang muslim dan pemilik menawarkan untuk mengeolah tanah tersebut sebagai pengganti sewa tanah dan bersedia

³⁶Muh.fudhail Rahman, sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran negara islam, *jurnal Al-Iqtishad*, Vol.V N0.2, (juli 2013), diakses pada 09 Desember 2019, h.244.

memberikan sebagian hasil produksinya kepada negara. Jumlah dari kharaj bersifat tetap, yaitu setengah dari hasil produksi tanah tersebut.³⁷

Kharaj adalah pajak terhadap tanah atau di Indonesia setara dengan pajak bumi dan bangunan (PBB) dengan sistem kharaj ditentukan berdasarkan tingkat produktifitas dari tanah (Land productivity) bukan berdasarkan zoning. Hal ini berarti bahwa bisa jadi untuk tanah yang bersebelahan sekalipun misalnya disatu sisi ditanami anggur sedangkan disisi lain ditanami kurma, maka kharaj yang dibayarkan oleh pemilik tanah berbeda.³⁸

Para Ulama Syi'ah mengatakan bahwa sumber pendapatan apapun harus dikenakan Khums sebesar 20%, sedangkan Ulama Sunni beranggapan bahwa ayat ini berlaku untuk harta rampasan perang saja. Imam Abu Ubaid menyatakan bahwa yang dimaksud Khums ini bukan saja hasil perang, tetapi juga barang temuan dan barang tambang.³⁹

Jika tanah dan harta lain diperoleh dari peperangan disebut Ghonimah, ghanimah adalah pendapatan negara atas harta yang diperoleh kaum muslimin dari musuh melalui kemenangan dalam peperangan. Dalam konteks perekonomian modern sekarang boleh saja menggolongkan barang sitaan sebagai barang ghanimah. Ghanimah ini merupakan sumber pendapatan utama negara islam periode awal.⁴⁰ Dasarnya adalah terdapat dalam Al-Quran surah al-Anfal ayat 41 :

³⁷ *Ibid*, h.245.

³⁸ *Ibid*.

³⁹ *Ibid*.

⁴⁰ *Ibid*.

وَأَعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ خُمُسُهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ
وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ إِن كُنْتُمْ ءَامَنْتُمْ بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلْنَا عَلَىٰ
عَبْدِنَا يَوْمَ الْفُرْقَانِ يَوْمَ التَّقَىٰ أَجْمَعِينَ ۖ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿٤١﴾

Artinya : “Ketahuilah, sesungguhnya apa saja yang dapat kamu peroleh sebagai rampasan perang (ghanimah), maka sesungguhnya seperlima untuk Allah, Rasul, kerabat, Rasul, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan Ibnu Sabil, jika kamu beriman kepada Allah dan kepada apa yang kami turunkan kepada hamba kami (Muhammad) di hari Furqan, yaitu di hari bertemunya dua pasukan dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu”. (QS Al-Anfal :41).

Ghanimah berbeda dengan fay'i, fay'i adalah harta yang diperoleh dari musuh tanpa mengerahkan kuda atau peperangan baik harta tak bergerak seperti tanah dan pajak yang dikenakan pada tanah tersebut(kharaj), pajak kepala(jizyah) dan bea cukai(ushr) yang dikenakan pada pedagang non muslim.⁴¹ jika pergantian pemerintahan dengan tidak peperangan tetapi dengan kudeta atau memenangkan pemilu, penyerahan secara damai negara jajahan dan cara-cara lain maka tanah negara dan harta benda lainnya disebut Fa'i sebagaimana dalam firman-Nya:

وَمَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ مِنْهُمْ فَمَا أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَلَا رِكَابٍ
وَلَكِنَّ اللَّهَ يُسَلِّطُ رُسُلَهُ عَلَىٰ مَنْ يَشَاءُ ۚ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿٤٢﴾

Artinya : “Dan apa saja harta rampasan (fay'i) yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya (dari harta benda) mereka, maka untuk mendapatkan itu kamu tidak mengerahkan seekor kuda pun dan (tidak pula) seekor onta pun, tetapi Allah yang memberikan kekuasaan kepada Rasul-Nya terhadap apa saja

⁴¹Gusfahmi, *Pajak dan Menurut Syariah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2011),h.103

yang dikehendaki-Nya dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu”.(QS Al-Hasyr :6)

Fay’i menjadi pendapatan penuh negara karena negara memiliki otoritas penuh dalam menentukan kegunaan pendapatan tersebut yaitu untuk kebaikan khalayak umum.

Jizyah adalah pajak yang dibebankan diambil dari penduduk non-Muslim yang ada di negara Islam sebagai pengganti fasilitas sosial-ekonomi dan layanan kesejahteraan lainnya, serta untuk mendapatkan perlindungan keamanan dari negara islam.⁴² Orang orang non muslim diberi kebebasan dalam melakukan aktivitasnya baik dalam bidang keagamaan mereka dapat bebas beribadah maupun melakukan hal yang lainnya karena mereka mendapatkan perlindungan dari negara dengan adanya pembayaran jizyah.⁴³ Sebagaimana dijelaskan dalam Alquran Surah At-Taubah ayat 29:

قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ
اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى
يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ ﴿٢٩﴾

Artinya :*“perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan tidak (pula) kepada hari kemudian, dan mereka tidak mengharamkan apa yang diharamkan oleh Allah dan RasulNya dan tidak beragama dengan agama yang benar (agama Allah), (Yaitu orang-orang) yang diberikan Al-Kitab kepada mereka, sampai mereka membayar jizyah dengan patuh sedang mereka dalam keadaan tunduk”*.(QS. Surah At-Taubah:29).

⁴²Masnun Tahir & Zusiana Elly Triantini, “Integrasi Zakat dan Pajak Di Indonesia Dalam Tinjauan Hukum Positif dan Hukum Islam”, *Jurnal Al-‘Adalah*, Vol.XII, No. 3, (Juni 2015), diakses pada 24 Januari 2020.

⁴³*Ibid*

Karena Orang-orang non muslim tidak mengenal zakat fitrah, maka jizyah sama saja dengan menarik pajak. Jumlah yang harus dibayar sama dengan jumlah minimum dengan yang dibayar oleh orang Islam. Jika adapun yang keberatan dengan jizyah sebenarnya baik muslim maupun no-muslim sama sama membayar pada pemerintahan karena bagi muslim diwajibkan membayar zakat yang salah satunya adalah zakat fitah setiap tahunnya.

Kafarat menjadi salah satu Pendapatan lainnya pada masa Rasulullah Saw dan para sahabat, yaitu denda misalnya denda yang dikenakan kepada suami istri yang berhubungan di siang hari pada bulan puasa. Mereka harus membayar denda dan denda tersebut masuk dalam pendapatan negara.

Pemerintahannegara muslimin juga memiliki sumber pendapatan lain bukannya hanya penerimaan pokok saja yaitu seperti wakaf (pemberian aset abadi dari rakyat untuk kebutuhan publik yang terbatas maupun tidak terbatas), hibah, hadiah dan sebagainya yang diterima secara tidak tetap.sebagai landasan waqaf disebutkan salam Al-Quran :

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ ۚ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ

عَلِيمٌ ﴿٩٢﴾

Artinya : “kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan, maka sesungguhnya Allah mengetahuinya”.(QS Ali Imran :92)

Negara dapat melakukan pemungutan pajakJika kebutuhan publik belum terpenuhi, negara dapat memungut pajak tambahan tergantung dengan situasi negara pada saat itu.

1. Pajak dalam perspektif hukum Islam

Pajak dalam bahasa Arab disebut dengan istilah Dharibah, secara bahasa dharibah dalam penggunaannya memiliki banyak arti namun para ulama memakai ungkapan dharibah untuk membayar harta yang dipungut secara wajib. Jadi, dharibah ialah harta yang dipungut secara wajib oleh negara untuk selain jizyah dan kharaj, sekalipun dapat dikategorikan dharibah.⁴⁴ Ada tiga ulama yang memberikan definisi tentang pajak, yaitu Yusuf Qardhawi dalam kitabnya *Fiqh Az-Zakah*, Gazy Inayah dalam kitabnya *Al-Iqtishad al-Islami az-Zakah wa ad-Dharibah*, dan Abdul Qadim Zallum dalam kitabnya *Al-Amwal fi Daulah al-Khilafah*, sebagai berikut :

a. Yusuf Qardhawi berpendapat :

Pajak adalah kewajiban yang ditetapkan terhadap wajib pajak, yang harus disetorkan kepada negara sesuai dengan ketentuan, tanpa mendapat prestasi kembali dari negara, dan hasilnya untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum di satu pihak dan untuk merealisasi sebagian tujuan ekonomi, sosial, politik, dan tujuan-tujuan lain yang ingin dicapai oleh negara.⁴⁵

b. Gazy Inayah berpendapat :

Pajak adalah kewajiban untuk membayar tunai yang ditentukan oleh pemerintah atau pejabat berwenang yang bersifat mengikat

⁴⁴Maman Surahman, Fadilah Ilahi, "Konsep Pajak dalam Islam". *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah*, Vol.1 No.2(Juli 2017), diakses pada 1 Desember 2019, h.168

⁴⁵Gusfahmi, *Pajak Menurut Syariah*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2011), h. 31

tanpa adanya imbalan tertentu. Ketentuan pemerintah ini sesuai dengan kemampuan si pemilik harta dan dialokasikan untuk mencukupi kebutuhan pangan secara umum dan untuk memenuhi tuntutan politik keuangan bagi pemerintahan.⁴⁶

c. Abdul Qadim Zallum berpendapat :

Pajak adalah harta yang diwajibkan Allah Swt kepada kaum Muslim untuk membiayai berbagai kebutuhan dan pos-pos pengeluaran yang memang diwajibkan atas mereka, pada kondisi Baitul Mal tidak ada uang/harta.⁴⁷

Seperti halnya dengan pajak, retribusi daerah juga merupakan penerimaan suatu daerah yang hasilnya guna membiayai pengeluaran-pengeluaran umum pemerintah daerah untuk merealisasikan tujuan yang telah dibuat suatu daerah atau pemerintahan itu sendiri. Seperti yang dijelaskan dalam Al-Quran Allah SWT berfirman dalam surah At-Taubah ayat 29 :

قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ ﴿٢٩﴾

Artinya : “Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan tidak (pula) kepada hari kemudian, dan mereka tidak mengharamkan apa yang diharamkan oleh Allah dan RasulNya dan tidak beragama dengan yang benar (agama Allah), (Yaitu orang-orang) yang diberikan

⁴⁶ Ibid

⁴⁷ Ibid

Al-Kitab kepada mereka, sampai mereka membayar jizyah dengan patuh sedang mereka dalam keadaan tunduk.”(QS.Surah At-Taubah:29)

Dari beberapa definisi di atas nampak definisi yang dikemukakan oleh Abdul Qadim lebih tepat dan mendekati nilai-nilai penting dalam ketentuan pajak menurut syariat. yaitu :

- 1) Diwajibkan oleh Allah Swt
- 2) Objeknya adalah harta (al-Maal)
- 3) Subjeknya kaum muslim yang kaya
- 4) Diberlakukan hanya karena adanya kondisi darurat (khusus), yang harus segera diatasi oleh Ulil Amri.⁴⁸

Diperbolehkannya kewajiban memungut pajak atau retribusi alasan utamanya adalah untuk kemaslahatan umat atau kepentingan umum, karena dana pemerintahan tidak cukup atau kekosongan Baitul mal untuk membiayai berbagai pengeluaran yang jika pengeluaran itu tidak dibiayai maka akan timbul kemudharatan. Sedangkan mencegah kemudharatan adalah sebuah kewajiban.⁴⁹

2. Retribusi dan Pajak dalam Hukum Islam

a. Anfal, Ghanimah, Fa'i dan Khums

Ibnu Abbas dan mujahid berpendapat bahwa anfal adalah ghanimah, yakni segala harta kekayaan orang kafir yang dikuasai oleh kaum muslimin melalui perang penaklukan. Pihak yang berwenang untuk mendistribusikan ghanimah adalah Rasulullah

⁴⁸*Ibid*,h.32.

⁴⁹Maman Surahman, Fadilah Ilahi, “Konsep Pajak dalam Islam”. *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah*, Vol.1 No.2(Juli 2017), diakses pada 1 Desember 2019,h.172.

SAW dan para khalifah setelah beliau. Pendistribusiannya hanya untuk kepentingan kaum muslim, Rasulullah SAW telah membagikan ghanimah Bani Nadhir kepada kaum muhajirin dan tidak kepada kaum anshar, kecuali sahal bin Hanif dan Abu Dujanah karena keduanya sangat fakir. Rasulullah SAW juga memberikan ghanimah kepada mualaf pada perang hunain dalam jumlah yang besar. Hal tersebut juga dilakukan pada masa Khulafaur rasyidin, khalifah berhak membagikan ghanimah kepada pasukan perang, ia juga dapat mengumpulkannya Fai, jizyah dan kharaj untuk terwujudnya kemaslahatan kaum muslimin.⁵⁰

Seperti yang pernah terjadi pada Bani Nadhir, atau orang-orang kafir yang melarikan diri karena takut terhadap kaum muslimin, dengan meninggalkan rumah dan harta mereka, sehingga harta tersebut dikuasai oleh kaum muslimin, atau orang-orang kafir takut dan melakukan perdamaian dengan kaum muslimin serta dengan menyerahkan sebagian harta dan tanah mereka, adalah sumber pendapatan berupa harta kekayaan orang-orang kafir yang dikuasai oleh kaum muslim tanpa melalui peperangan disebut dengan fa'i.

Harta Fa'i ini menjadi milik Rasulullah saw, sebagian dibelanjakan oleh beliau untuk membelanjakan keperluan keluarganya selama satu tahun, sisanya dijadikan oleh beliau untuk keperluan amunisi dan penyediaan senjata perang setelah beliau

⁵⁰Gusfahmi, *Pajak Menurut Syariah*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2007), h.79-83

wafat, Abu Bakar dan Umar melakukan hal yang sama. Setelah wafatnya Rasulullah SAW dan kerabat beliau dimasukkan kedalambaitul mal, untuk digunakan demi kemaslahatan kaum muslimin dan jihad fi sabilillah.⁵¹

b. Kharaj

Kharaj merupakan hak kaum muslimin yang diberikan Allah SWT atas tanah yang dilakukan dari orang kafir, baik melalui peperangan maupun jalan damai yang merupakan pendapatan negara yang tergolong pendapatan negara fay'i yang diwajibkan setelah menunggu satu tahun.⁵² Oleh karena itu kharaj dibagi menjadi dua, yaitu : kharaj unwah dan kharaj shulhi.

Kharaj unwah adalah kharaj yang diambil dari semua tanah yang dikuasai oleh kaum muslimin dari orang-orang kafir secara paksa melalui perang, misalnya tanah Irak, Syam dan Mesir. Sedangkan Kharaj shulhi adalah kharaj yang diambil dari setiap tanah yang penduduknya telah menyerahkan diri kepada kaum muslimin secara damai.⁵³ Kharaj ini ada seiring dengan terjadinya perdamaian yang disepakati diantara kaum muslimin dan penduduk tinggal di atasnya dengan kesediaan membayar kharaj, maka berlaku secara permanen atas tanah tersebut. Artinya, ia tetap sebagai tanah kharajiyah sampai hari kiamat, walaupun penduduknya berubah menjadi kaum

⁵¹*Ibid*

⁵²*Ibid*, h.110

⁵³Aulia N.P, keuangan Publik Islam, <https://aulianputri.blogspot.com/2019/09/kharaj-dan-jizyah.html?m=1>, diakses pada 10 desember 2019.

muslimin atau dijual kepada orang islam, atau ada sebab yang lainnya. Apabila disepakati bahwa tanah tersebut tetap menjadi milik mereka dan dikuasai oleh mereka, dengan membayar sejumlah kharaj yang ditetapkan. Maka kharaj tersebut menepati posisi jizyah, yang akan gugur dengan keislaman mereka atau tanah tersebut dijual kepada seorang muslim.

Sedangkan untuk menetapkan besarnya kharaj, khalifah dapat bermusyawarah dengan para ahli yang dapat memperhitungkan luas tanah, atau tanamannya, atau diukur berdasarkan kadar hasil panennya.⁵⁴ Sebagaimana yang telah dilakukan oleh Khalifah Umar ketika akan menetapkan kharaj atas tanah sawad. Maka ketika akan menetapkan kharaj haruslah diperhatikan kondisi tanah tersebut, tingkat kesuburannya, tingkat produksinya, cara pengairannya, karena semua hal tersebut beragam. Termasuk harga produk pertaniannya, letak geografisnya dari pasar, kota, transportasi dan sebagainya. Pada prinsipnya tidaklah ditetapkan kharaj atas pemilik di luar batas kemampuan pemiliknya.

Kharaj berbeda dengan usyur. Usyur adalah apa yang diambil atas hasil pertanian tanah Ushriyyah yang termasuk tanah ushriyyah adalah :

⁵⁴Gusfahmi, *Pajak Menurut Syariah*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2007, h.111

- 1) Jazirah Arab
- 2) Tanah yang penduduknya masuk islam secara damai, seperti di Indonesia
- 3) Tanah unwh yang dibagikan kepada pasukan perang kaum muslimin, seperti tanah khaibar
- 4) Tanah yang penduduknya melakukan perdamaian dengan kaum muslimin dengan kesepakatan tanah tersebut milik mereka. Maka apabila mereka masuk Islam atau dijual kepada seorang muslim, tanah tersebut menjadi tanah Usyriyyah.⁵⁵

Kharaj adalah hak kaum muslimin, dan dipergunakan untuk kemaslahatan negara, seperti membayar gaji pegawai, tentara, pengadaan senjata, diberikan kepada para janda, dan orang-orang yang membutuhkan, dalam hal ini khalifah menyalurkannya sesuai dengan pendapat dan ijtihadnya.

c. Jizyah

Jizyah adalah hak yang diberikan oleh Allah SWT kepada kaum muslimin dari orang-orang kafir, karena adanya ketundukan mereka kepada pemerintahan islam. Jizyah merupakan harta kaum muslimin yang digunakan untuk kemaslahatan kaum muslimin, dan wajib diambil dari penduduk non-muslim setelah melewati satu tahun sebagai biaya untuk perlindungan mereka.

⁵⁵Muhammad syamsudin.NU Online, Pajak Tanah di Masa Nabi dan di Masa Umar bin Khatab, <https://islam.nu.or.id/post/read/102137/pajak-tanah-di-masa-nabi-dan-di-masa-umar-bin-khatab>, diakses pada 10 Desember 2019

Jizyah wajib diambil dari orang-orang kafir, selama mereka tetap kufur, namun apabila mereka memeluk islam, maka gugurlah jizyah dari mereka. Jizyah diwajibkan untuk orang-orang kafir laki-laki, berakal, baligh, dan mampu membayarnya. Untuk besaran jizyah, tidak ditetapkan dengan suatu jumlah tertentu, namun ditetapkan berdasarkan kebijakan dan ijtihad khalifah, dengan catatan tidak melebihi kemampuan orang yang wajib membayar jizyah.⁵⁶ Apabila jizyah diberlakukan kepada orang yang mampu, sementara dia keberatan membayarnya, maka dia tetap dianggap mempunyai hutang terhadap jizyah tersebut. Dia akan diperlakukan sebagaimana orang yang mempunyai hutang.

Tabel.1
Ketetapan Jizyah Pada Masa Khalifah Umar⁵⁷

No	Subjek	Tarif
1	Pekerja manual dan orang miskin, pembajak tanah, petani, dan sebagainya	12 dirham per tahun
2	Kelompok berpenghasilan menengah	24 dirham per tahun
3	Orang kaya, seperti pedagang pakaian, pemilik kebun dan lainnya	48 dirham

⁵⁶Gusfahmi, *Pajak Menurut Syariah*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2011, h.105

⁵⁷*Ibid*, h.108

d. Ushr

Ushr merupakan hak kaum muslimin yang diambil dari harta dan barang perdagangan Ahlu Dzimmah dan kafir Harbi yang melewati perbatasan negara khalifah. Ada beberapa hadis yang menjelaskan bahwa khalifah Umar dan khalifah sesudahnya memungut Ushr dari pedagang yang melewati batas negara melalui pos-pos perbatasan. Ziyad ibn Judair mengatakan, Umar bin Khattab pernah memperkerjakan saya untuk memungut Ushr dan memerintahkan saya agar memungut 10% ushr dari perdagangan kaum muslimin.⁵⁸ Istilah ushr tidak ditemukan didalam Al-Quran tetapi kita dapat menggunakan dua ayat yaitu Surah Al-Baqarah:267 dan surah Al-An'am :141 sebagai acuan. Fiman Allah Swt :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا
لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ

Artinya : *"Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (dijalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untuk kamu."*(QS Al-Baqarah : 267)

كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَءَاتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ ۚ وَلَا تُسْرِفُوا
إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ ﴿١٤١﴾

Artinya : *...Makanlah dari buahnya (yang bermacam-macam itu) bila dia berbuah, dan tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya (dengan disedekahkan kepada fakir miskin); dan janganlah kamu*

⁵⁸Ibid,h.114

berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan.” (QS Al-An’am:141)

3. Ijarah

Al-Ijarah berasal dari kata al ajru yang berarti al’-Iwadhu atau berarti ganti, dalam pengertian syara’al-Ijarah adalah suatu jenis akad yang mengambil manfaat dengan jalan penggantian. Suatu perjanjian yang mana pihak satu mengikatkan diri untuk menyewakan kepada pihak lainnya berupa kenikmatan dari suatu barang, dalam waktu tertentu dan dengan jumlah pembayaran sesuai dengan kesepakatan. Akad Ijarah adalah transaksi sewa menyewa atas suatu barang dan/jasa antara pemilik objek sewa termasuk kepemilikan hak pakai atas objek sewa dengan penyewa untuk mendapatkan imbalan atas objek yang disewakan.⁵⁹

Dari definisi diatas bahwa akad Ijarah adalah merupakan transaksi tanpa disertai adanya pemindahan hak kepemilikan yang mana disebut sewa menyewa jika objeknya adalah suatu benda dan upah mengupah jika objeknya berupa suatu manfaat. Munculnya ijarah adalah suatu bentuk dari akibat kebutuhan akan jasa dan manfaat.

Didalam istilah hukum islam penyebutan untuk seseorang yang menyewakan disebut dengan muajir sedangkan untuk seseorang yang menyewa disebut dengan musta’jir, ma’jur untuk benda yang disewakan

⁵⁹Puji Kurniawan, Analisis Kontrak Ijarah, *Jurnal El-Qanuny*, Vol.4 No.2, Juli-Desember 2018, diakses pada 06 Desember 2019,h.199.

dan ujah untuk penyebutan uang sewa atau imbalan atas pemakaian manfaat barang.⁶⁰

Adapun dasar hukum mengenai sewa menyewa (Ijarah) terdapat dalam al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 233:

وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿٢٣٣﴾

Artinya: "dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan". (QS.Surah Al-Baqarah:233)

Rukun dan syarat-syarat Ijarah adalah sebagai berikut:

- 1) Mu'jir dan musta'jir. Unsur yang terpenting keduanya cakap hukum (berakal) serta dewasa (baligh)
- 2) Sighat ijab dan kabul antara mu'jir dan musta'jir. Ijab dan qabul merupakan bentuk tentang adanya rasa suka sama suka.
- 3) Ujah, diisyaratkan diketahui oleh kedua belah pihak
- 4) Barang yang disewakan atau yang dikerjakan dalam upah mengupah hendaknya diketahui manfaatnya. Manfaat benda yang disewapun diperbolehkan menurut syara' bukan yang dilarang dan benda yang diewakan diisyaratkan kekal zatnya hingga waktu yang ditentukan dalam perjanjian akad.⁶¹

⁶⁰Ibid.

⁶¹Ibid, h.200

Dua sebab yang dapat membatalkan ijarah yaitu rusaknya benda yang diewakan dan hilangnya tujuan yang diinginkan dari ijarah tersebut.⁶²

B. Retribusi Pasar Menurut Hukum Positif

1. Pengertian Retribusi

Menurut Undang-Undang No.33 Tahun 2004 pasal 5 ayat 2 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah disebutkan bahwa sumber pendapatan daerah terdiri atas:

a. pendapatan asli daerah yaitu:

- 1) pajak daerah
- 2) retribusi daerah
- 3) hasil pengelolaan keyaan daerah yang dipisahkan, dan
- 4) lain-lain PAD yang sah.

b. dana perimbangan

c. lain-lain pendapatan.⁶³

Sebelum kita mengetahui lebih lanjut tentang retribusi pasar ada baiknya kita mengenal terlebih dahulu apa itu retribusi dan pajak yang dikemukakan oleh beberapa para ahli.

Darwin menyatakan bahwa yang dimaksud retribusi adalah pada umumnya retribusi dibayar langsung oleh mereka yang menikmati suatu

⁶²*Ibid*, h.202

⁶³Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah pasal 5

pelayanan dan biasanya dimaksudkan untuk menutupi seluruh atau sebagian pelayanannya.⁶⁴

Retribusi menurut Mariot P.Siahaan adalah: “retribusi adalah pembayaran wajib dari penduduk kepada negara karena adanya jasa tertentu yang diberikan oleh negara bagi penduduknya secara perorangan jasa tersebut dapat dikatakan bersifat langsung, yaitu hanya yang membayar retribusi yang menikmati balas jasa dari negara”.⁶⁵

S.Munawir menyatakan bahwa yang dimaksud retribusi adalah iuran kepada pemerintah yang dapat dipaksakan dan jasa baik secara langsung dapat ditunjuk. Paksakan ini bersifat ekonomis karena siapa saja yang tidak merasakan jasa balik dari pemerintah, dia tidak akan dikenakan iuran tersebut.⁶⁶

Berdasarkan pengertian di atas, maka dapat ditarik kesimpulan retribusi adalah pembayaran yang sah yang dibayar langsung atas jasa atau pelayanan negara.

2. Retribusi daerah

Retribusi daerah, sebagaimana halnya dengan pajak daerah merupakan salah Satu sumber pendapatan daerah yang mana dapat diharapkan akan menjadi salah satu sumber pembiayaan pelaksanaan pemerintahan dan guna pembangunan daerah, untuk meningkatkan dan

⁶⁴Nindiana Lestary,”Proses Implementasi Kebijakan dalam Pemungutan Retribusi Pasar Way Batu Kabupaten Lampung Barat (Universitas Lampung, Bandar Lampung : 2015) diakses pada 26 November 2019, h.20

⁶⁵*Ibid.*

⁶⁶*Ibid.*

mensejahterakan masyarakat. Dalam Undang-undang dasar 1945 pada pasal 23A ditegaskan bahwa pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dalam undang-undang,⁶⁷ yang artinya dalam pasal tersebut segala beban kepada rakyat seperti pajak dan lain-lainnya harus ditetapkan dengan undang-undang.

Dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau umum.⁶⁸

Retribusi menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.⁶⁹

Dapat kita simpulkan bahwa retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan pribadi atau badan.

⁶⁷Undang-Undang Dasar 1945 pasal 23A.

⁶⁸Undang-Undang Nomor 34 tahun 2000,Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pasal 1 Ayat 26.

⁶⁹Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009, Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pasal 1.

a. Ciri-ciri retribusi daerah

Menurut Josef Riwu Kaho ciri-ciri retribusi daerah adalah sebagai berikut :

- 1) Dipungut oleh daerah
- 2) Dalam pemungutan retribusi prestasi yang langsung dapat ditunjuk
- 3) Retribusi dikenakan pada siapa saja yang memanfaatkan atau mengeyam jasa yang disediakan daerah.⁷⁰

Sedangkan menurut Musgrave, ciri-ciri retribusi yang tepat dalam retribusi daerah adalah:

- a) Retribusi dikenakan pada siapa saja yang menggunakan jasa yang diberikan oleh daerah
- b) Adanya balas jasa yang langsung dapat diterima oleh pembayar retribusi
- c) Bagi yang telah menikmati jasa lalu tidak membayar retribusi dapat dikenakan sanksi atau upaya memaksa
- d) Retribusi dipungut oleh daerah berdasarkan Undang-undang dan Peraturan pelaksanaannya.⁷¹

Dapat kita simpulkan dari dua pendapat diatas yang dimaksud dengan ciri-ciri retribusi daerah adalah pungutan yang berdasarkan

⁷⁰Nindiana Lestary, "Proses Implementasi Kebijakan dalam Pemungutan Retribusi Pasar Way Batu Kabupaten Lampung Barat (Universitas Lampung, Bandar Lampung : 2015) diakses pada 26 November 2019, h.22.

⁷¹Ardana indra permana, "Analisis Penerimaan Retribusi Pasar di Kota Semarang" (Universitas Dipenogoro, Semarang, 2013) diakses pada 29 November 2019, h.31.

Undang-undang dikenakan pada siapa saja yang menerima pelayanan daerah yang apabila tidak membayar dapat dikenakan sanksi atau denda.

b. Dasar hukum pemungutan Retribusi daerah

- 1) Undang-Undang Dasar 1945 pasal 23
- 2) Undang-Undang No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan daerah
- 3) Undang-Undang No.28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Dalam tiap-tiap daerah retribusi dipungut berdasarkan peraturan masing-masing daerah pemungut retribusi yang mana peraturan tersebut peraturan yang sudah disahkan oleh kepala daerah masing-masing.

c. Fungsi retribusi daerah

1) Penerimaan

Fungsi penerimaan adalah merupakan fungsi pokok dari retribusi, artinya retribusi dijalankan sebagai alat untuk menutup APBD terutama yang menyangkut kelancaran penyediaan jasa dan pelayanan kepada masyarakat pembayar retribusi.

2) Pengatur

Fungsi pengatur retribusi artinya digunakan sebagai alat atau perangkat untuk menata kehidupan ekonomi dan sosial masyarakat.

d. Syarat pemungutan retribusi daerah

1) Pemungutan retribusi harus adil (syarat keadilan)

hukum pajak mempunyai tujuan yang sama dengan tujuan hukum lainnya, yaitu membuat adanya keadilan dalam hal pemungutan retribusi baik adil dalam perundang-undangan maupun dalam pelaksanaannya.

2) Pemungutan retribusi harus berdasarkan UU (Syarat yuridis)

Hukum retribusi harus dapat memberi jaminan hukum untuk menyatakan keadilan yang tegas baik untuk negara ataupun warganya. Disamping itu dalam menyusun Undang-undang harus diusahakan untuk mencapai keadilan dalam pemungutan retribusi.

3) Tidak mengganggu perekonomian(syarat ekonomis)

Pemungutan retribusi dan kebijakan retribusi jangan sampai menghambat perekonomian, baik dalam bidang produksi maupun perdagangan dan jangan sampai merugikan kepentingan umum dan menghalangi usaha rakyat dalam mencapai kemakmuran.

4) Pemungutan retribusi harus efisien

Pemungutan retribusi hendaknya jangan memakan biaya pemungutan yang besar dan pemungutan hendaknya mencegah inflasi.

5) Sistem pemungutan retribusi harus sederhana

Untuk mencapai efisiensi, retribusi harus diterapkan dengan sistem retribusi yang sederhana sehingga memudahkan bagi masyarakat untuk menghitungnya.⁷²

3. Objek Retribusi

Objek Retribusi adalah:

a. Jasa Umum

Objek Retribusi Jasa Umum adalah pelayanan yang disediakan atau diberikan Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan. Jenis Retribusi Jasa Umum adalah:

- 1) Retribusi Pelayanan Kesehatan;
- 2) Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan;
- 3) Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Penduduk dan Akta Catatan Sipil;
- 4) Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat;
- 5) Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum;
- 6) Retribusi Pelayanan Pasar;
- 7) Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor;
- 8) Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran;
- 9) Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta;
- 10) Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus;

⁷²*Ibid*,h.33

- 11) Retribusi Pengolahan Limbah Cair;
- 12) Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang
- 13) Retribusi Pelayanan Pendidikan; dan
- 14) Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi.⁷³

b. Jasa Usaha; dan

Objek Retribusi Jasa Usaha adalah pelayanan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial yang meliputi:

- 1) Pelayanan dengan menggunakan/memanfaatkan kekayaan Daerah yang belum dimanfaatkan secara optimal; dan/atau
- 2) Pelayanan oleh Pemerintah Daerah sepanjang belum disediakan secara memadai oleh pihak swasta.

Jenis Retribusi Jasa Usaha adalah:

- a) Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
- b) Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan;
- c) Retribusi Tempat Pelelangan;
- d) Retribusi Terminal;
- e) Retribusi Tempat Khusus Parkir;
- f) Retribusi Tempat penginapan/pesanggrahan/villa
- g) Retribusi Rumah Potong Hewan;
- h) Retribusi Pelayanan Kepelabuhan;
- i) Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga;

⁷³Undang-undang Pajak Lengkap Tahun 2011. (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2011), h.416

- j) Retribusi Penyebrangan di Air; dan
 - k) Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah.⁷⁴
- c. Perizinan Tertentu

Objek Retribusi Perizinan Tertentu adalah pelayanan perizinan tertentu oleh Pemerintah Daerah kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pengaturan dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan. Jenis Retribusi Tertentu adalah:

- 1) Retribusi Izin Mendirikan Bangunan;
- 2) Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol;
- 3) Retribusi Izin Gangguan;
- 4) Retribusi Izin Trayek; dan
- 5) Retribusi Izin Usaha Perikanan.⁷⁵

4. Retribusi Pelayanan Pasar

a. Pengertian Retribusi Pelayanan Pasar

Menurut William J. Stanton, pengertian pasar adalah sekumpulan orang yang ingin meraih kepuasan menggunakan uang untuk berbelanja, serta memiliki kemauan untuk membelanjakan uang

⁷⁴*Ibid*, h.419

⁷⁵*Ibid*, h.422.

tersebut.⁷⁶ Sedangkan menurut Kotler dan Amstrong, pengertian pasar adalah sejumlah pembeli aktual dan juga potensial dari sebuah produk atau jasa. Besarnya pasar tergantung pada jumlah orang yang punya kebutuhan dan mau melakukan transaksi. Banyak pemasar yang menganggap bahwa pembeli dan penjual adalah sebuah pasar , dimana pembeli akan menerima produk/jasa yang diinginkan setelah melakukan pembayaran. Dan penjual akan mengirimkan produk/ jasa yang telah dibayar oleh si pembeli.⁷⁷

Pengertian retribusi pelayanan pasar berdasarkan Peraturan Daerah Way Kanan Nomor 08 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum disebutkan bahwa Retribusi Pelayanan Pasar merupakan pungutan retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan penyediaan fasilitas pasar tradisional/ sederhana berupa pelataran, los, kios yang dikelola oleh pemerintah daerah dan disediakan khusus untuk pedagang.⁷⁸

Dari pengertian diatas dapat kita simpulkan bahwa retribusi pelayanan pasar merupakan pelayanan yang menyediakan fasilitas pasar baik tradisional/ sederhana yang berguna untuk menunjang kegiatan jual beli dalam suatu daerah tertentu yang disediakan atau difasilitasi oleh Pemerintah setempat.

⁷⁶ Achmad fadli, "Pemungutan Retribusi Pasar dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Lampung Selatan (Universitas Lampung, Bandar Lampung : 2019) diakses pada 26 November 2019, h.25.

⁷⁷ *Ibid*

⁷⁸ Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum pasal 24

b. Subjek dan Objek retribusi pelayanan Pasar

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan No.08 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum.

1) Subjek Retribusi Pelayanan Pasar

Subjek retribusi pelayanan pasar adalah orang atau badan yang memperoleh pelayanan penyediaan fasilitas pasar tradisional/sederhana berupa pelataran, los, dan kios dari Pemerintahan Daerah.⁷⁹

2) Objek Retribusi Pelayanan Pasar

Objek retribusi pelayanan pasar adalah penyediaan pelayanan fasilitas pasar tradisional/sederhana, berupa pelataran, los, dan kios yang dikelola Pemerintah Daerah dan khusus disediakan untuk pedagang dan dikecualikan untuk objek pelayanan pasar adalah pelayanan fasilitas pasar yang dikelola oleh BUMN, BUMD dan pihak swasta.⁸⁰

3) Cara mengukur tingkat Penggunaan Jasa

Cara mengukur tingkat penggunaan jasa retribusi pelayanan pasar adalah diukur berdasarkan penggunaan jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan tempat berdagang diukur berdasarkan atas jenis bangunan, luas bangunan dan frekuensi.⁸¹

⁷⁹Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum Pasal 26

⁸⁰Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum pasal 25

⁸¹Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum pasal 53

4) Struktur dan besarnya Tarif Retribusi⁸²

Tabel.2
Struktur dan besarnya Tarif retribusi

Jenis bangunan	Luas	Tarif
a. Kios		
1) Permanen	3 x 2, 3 x 3, 3 x 4	Rp.2.500,-/hr
2)Semi Permanen	3 x 2, 3 x 3, 3 x 4	Rp.2.500,-/hr
b. Los		
1)Permanen	2 x 3	Rp.2.500,-/hr
	3 x 3	Rp.2.500,-/hr
	2 x 3	Rp. 2.500,-/hr
2)Semi Permanen		Rp.2.000,-/hr
c. Pelataran		Rp.1.000,-/hr

C. Tinjauan Pustaka

Masalah mengenai Retribusi pasar bukanlah hal yang baru, adapun beberapa penelitian yang mengangkat tentang Retribusi pelayanan pasar karena masih menjadi bahasan yang cukup menarik untuk diteliti.

Adapun hasil dari skripsi Achmad Fadli menjelaskan bahwasanya retribusi pasar dapat memberikan kontribusi positif terhadap naik pendapatan asli daerah (PAD) dengan meningkatnya Pendapatan asli daerah (PAD) suatu

⁸²Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum pasal 27

daerah akan lebih mandiri serta dapat menentukan arah perkembangan dan pembangunan dengan lebih baik.⁸³

Adapun hasil skripsi Rizki Samarotin pemungutan atau pendistribusian hasil retribusi pasar sudah sesuai dengan aspek keadilan dari segi pelayanan yang diberikan dan tarif retribusi yang dikenakan sudah baik namun masih saja banyak pedagang yang sulit untuk dipungut retribusinya sehingga petugas pemungut merasa kesulitan dalam menjalankan tugasnya.⁸⁴

Adapun hasil skripsi Noviati Putri Wardhani Pengaruh Retribusi Pasar dan Retribusi Pelayanan persampahan/ kebersihan terhadap pendapatan asli daerah di Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Sidoarjo”. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa secara simultan besarnya pengaruh Retribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sidoarjo sebesar 85,6% sedangkan 14,4% dijelaskan oleh pendapatan lain dan juga secara parsial retribusi pasar sebesar 82,7% dan 17,3% dijelaskan oleh pendapatan lain, Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan Daerah terhadap Pendapatan asli Daerah sebesar 64,4% sedangkan 35,6% dijelaskan oleh pendapatan lain.⁸⁵

⁸³ Achmad Fadli, “*Pemungutan Retribusi Pasar dalam meningkatkan pendapatan asli daerah di Kabupaten Lampung Selatan*”(Universitas Lampung, Bandar Lampung : 2019) diakses pada 26 November 2019.

⁸⁴ Rizki Samarotin, “*Pengelolaan Retribusi Pasar untuk meningkatkan Pelayanan publik Perspektif Ekonomi Islam*” (IAIN Purwokerto, Purwokerto : 2015) diakses pada 26 November 2019.

⁸⁵ Noviati Putri Wardhani “*Pengaruh Retribusi Pasar dan Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan Terhadap Pendapatan Asli Daerah di Dinas Pendapatan Pengelolaan Persampahan dan Aset Kabupaten Sidoarjo*” (Universitas Pembangunan Nasional: 2010) diakses pada 22 Desember 2019.

Dari keterangan diatas dapat disimpulkan bahwa yang menyusun dan mengkaji, memiliki spesifikasi tersendiri dibandingkan penelitian-penelitian lain. Karya ini bisa jadi merupakan bentuk kelanjutan dan melengkapi karya-karya yang sudah ada. Perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah didalam penelitian ini secara khusus menggunakan analisis Hukum Islam yang dikaji lebih mendalam.



DAFTAR PUSTAKA

Al-Quran Al-Karim

A. Buku-buku

A'an Efendi, Freddy Poernomo, IG. NG Indra S. Ranuh, *Teori Hukum Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2017.

Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Penelitian*, Bandung : PT. Citra Aditya Bhakti, 2004.

Adrian Sutedi, *Implikasi Hukum Atas Sumber Pembiayaan Daerah dalam Kerangka Otonomi Daerah, Cet. I*, Sinar Grafika Jakarta: 2009.

Ahmad Jalaluddin, *Pengantar Hukum Pajak*, Bandar Lampung: Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung, 2019.

Ali Muhammad, *Penelitian Kependidikan Prosedur dan Strategi*, Bandung: Angkasa, 1987.

Amirudin dan Zainal Abidin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006.

Gusfahmi, *Pajak dan Menurut Syariah*, Jakarta: Rajawali Pers, 2011.

Joko Subagyo, *Metode Penelitian dalam teori dan Praktek*, Jakarta: PT. Rineka cipta, 1994.

Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Riset Sosial*, Bandung: Alumni, 1986.

Koentjaraningrat, *Metode-metode Penelitian Masyarakat*, Jakarta: Gramedia, 1985.

Lexi J. Moeleong, *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Rosdakarya, 2010.

Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007.

Nurul Huda, dkk, *Keuangan Publik Islami Pendekatan Teoritis dan Sejarah*, Jakarta: Prenada Media Group, 2012.

Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1986.

Sugiono, *Metode Penelitian Kualitatif dan R&D*, Bandung: Al-fabeta, 2010

Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta.

Susiadi, *Metode Penelitian*, Bandar Lampung, Bandar Lampung: Pusat Penelitian dan Penertiban LP2M IAIN Raden Intan Lampung 2015.

Sutrisno Hadi, *Metode Research Jilid I*, Yogyakarta: Andi, 2002.

Sutrisno Hadi, *Metode Research*, Yogyakarta: Andi Offset, 1995.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Peraturan Bupati Nomor 50 Tahun 2016 tentang Kedudukan, susunan Organisasi, tugas dan Fungsi Tata Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kab. Way Kanan.

Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum.

Peraturan Pemerintah RI, Nomor 66 Tahun 2001, *Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah*, Focus Media, Bandung: 2009.

Undang-Undang Dasar 1945 pasal 23A.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah pasal 5.

Undang-Undang Nomor 34 tahun 2000, Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pasal 1 Ayat 26.

Undang-undang Pajak Lengkap Tahun 2011(Jakarta:Mitra Wacana Media,2011).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009, Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pasal 1.

C. Jurnal dan skripsi

Achmad fadli, Pemungutan Retribusi Pasar dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Lampung Selatan (Universitas Lampung, Bandar Lampung : 2019) diakses pada 26 November 2019.

Ardana indra permana, "Analisis Penerimaan Retribusi Pasar di Kota Semarang" (Universitas Dipenogoro, Semarang, 2013) diakses pada 29 November 2019.

AuliaN.P,KeuanganPublikIslam,<https://aulianputri.blogspot.com/2019/09/kharaj-dan-jizyah.html?m=1>, diakses pada 10 desember 2019.

Maman Surahman, fadilah Ilahi, “Konsep Pajak dalam Islam”. *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah*, Vol.1 No.2(Juli 2017), diakses pada 1 Desember 2019.

Masnun Tahir & Zusiana Elly Triantini, “Integrasi Zakat dan Pajak Di Indonesia Dalam Tinjauan Hukum Positif dan Hukum Islam”, *Jurnal Al-‘Adalah*, Vol.XII, No. 3, (Juni 2015), diakses pada 24 Januari 2020.

Muh.fudhail Rahman, sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran negara islam, *jurnal Al-Iqtishad*, Vol.V N0.2, (juli 2013), diakses pada 09 Desember 2019.

Muhammad syamsudin. NU Online, Pajak Tanah di Masa Nabi dan di Masa Umar bin Khatab, <https://islam.nu.or.id/post/read/102137/pajak-tanah-di-masa-nabi-dan-di-masa-umar-bin-khathab>, diakses pada 10 Desember 2019.

Nindiana Lestary,”Proses Implementasi Kebijakan dalam Pemungutan Retribusi Pasar Way Batu Kabupaten Lampung Barat (Universitas Lampung, Bandar Lampung : 2015) diakses pada 26 November 2019.

Noviati Putri Wardhani, Pengaruh Retribusi Pasar dan Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan Terhadap Pendapatan Asli Daerah di Dinas Pendapatan Pengelolaan Persampahan dan Aset Kabupaten Sidoarjo, (Universitas Pembangunan Nasional: 2010) diakses pada 22 Desember 2019.

PemerintahKabupatenWayKanan,*Sejarah*,<https://www.waykanankab.go.id/pages/sejarah> diakses pada 11 Desember 2019.

Puji Kurniawan, Analisis Kontrak Ijarah, *Jurnal El-Qanuny*, Vol.4 No.2, Juli-Desember 2018, diakses pada 06 Desember 2019.

Rizki Samarotin, “*Pengelolaan Retribusi Pasar untuk meningkatkan Pelayanan publik Perspektif Ekonomi Islam*” (IAIN Purwokerto, Purwokerto : 2015 diakses pada 26 November 2019.

Sri Murniati dan Dwi Kasasih, Analisis Kontribusi dan Efektivitas Penerimaan Retribusi Pelayanan Pasar Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Palembang, *Jurna Kompetitif*, Vol. 6 No.1, Januari-Juli 2017.

D. Wawancara

Apriawan, *wawancara* dengan Kepala UPTD pengelolaan Pasar wilayah Baradatu-Gunung Labuhan, 11 November 2019

Desy Melda, *wawancara* Sekretaris Dinas Perindustrian dan Perdagangan Way Kanan, 6 November 2019

Fina, *wawancara* kepada pedagang Pasar Inpres Tiuh Balak, 08 November 2019

Isa, *wawancara* kepada pedagang Pasar Inpres Tiuh Balak, 08 November 2019

Kusmiyati, *wawancara* kepada pedagang Pasar Inpres Tiuh Balak, 08 November 2019

Selfi, *wawancara* kepada pedagang Pasar Inpres Tiuh Balak, 08 November 2019

Siti, *wawancara* kepada pedagang Pasar Inpres Tiuh Balak, 08 November 2019

Siti, *wawancara* kepada pedagang Pasar Inpres Tiuh Balak, 08 November 2019

Sri Asih, *wawancara* kepada pedagang Pasar Inpres Tiuh Balak, 08 November 2019

Sugin, *wawancara* kepada pedagang Pasar Inpres Tiuh Balak, 08 November 2019

Suwardi, *wawancara* dengan kepala Kasubbag UPT Pengelolaan Pasar Wilayah II Baradatu-Gunung Labuhan, 8 November 2019